HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - HUKUM AGRARIA - HUKUM LINGKUNGAN

2014

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 5, LD KABUPATEN TEBO 2014/NO.5 , 23 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

ABSTRAK : Bahwa kegiatan usaha pertambangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah guna terciptanya pembangunan daerah secara berkelanjutan; bahwa untuk menjaga kualitas lingkungan hidup agar tetap terjaga dan untuk menjamin pemanfaatan lahan dibekas kegiatan pertambangan, perlu dilakukan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan dengan memperhatikan prinsip prinsip lingkungan hidup demi kelangsungan perikehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya terutama masyarakat sekitar; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihakyang terlibat dalam proses reklamasi dan pasca tambang maka diperlukan pengaturan tentang reklamasi dan pasca tambang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Reklamasi dan Pascatambang

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang prinsip reklamasi dan pascatambang, tata laksana reklamasi dan pasca tambang, persetujuan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang, pelaksanaan dan pelaporan, jaminan reklamasi dan pascatambang, penyerahan lahan reklamasi dan lahan bekas tambang, pengawasan, serta sanksi administratif bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang tidak memenuhi ketentuan.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Februari 2014.

Batang Tubuh: 23 Halaman